



Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia

Ade Sulistiana¹, Ambya², Prayudha Ananta³, I Wayan Suparta⁴, Arif Darmawan⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 8, 2025
Revised Juli 8, 2025
Accepted Juli 9, 2025

Kata Kunci:

Pengangguran ,
Inflasi,
Pertumbuhan Ekonomi,
Kualitas Sumber Daya
Manusia,
Penanaman Modal Asing.

Keywords:

*Inflation,
Economic Growth,
Human Capital,
FDI,
Unemployment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan data panel dari 33 provinsi selama tahun 2015 hingga 2023. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang berarti peningkatan inflasi cenderung menurunkan tingkat pengangguran dalam konteks Indonesia selama periode yang dianalisis. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh negatif signifikan, yang mana mendukung teori hukum Okun yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran. Sebaliknya, kualitas SDM menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran, yang menunjukkan bahwa peningkatan indikator SDM belum sepenuhnya mampu menekan tingkat pengangguran akibat ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, menandakan bahwa peningkatan investasi asing mampu menciptakan lapangan kerja baru yang mengurangi tingkat pengangguran.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of inflation, economic growth, quality of human resources and foreign investment on the unemployment rate in Indonesia. The type of research used is quantitative with a panel data approach from 33 provinces during 2015 to 2023. The data source used is secondary data obtained from the publication of the Central Statistics Agency (BPS). The results of the study indicate that inflation has a significant negative effect on the unemployment rate, which means that increasing inflation tends to reduce the unemployment rate in the context of Indonesia during the period analyzed. Economic growth also has a significant negative effect, which supports Okun's law theory which states that economic growth can reduce unemployment. Conversely, the quality of human resources shows a significant positive effect on unemployment, which indicates that increasing human resource indicators has not been fully able to reduce the unemployment rate due to the mismatch between education and labor market needs. Meanwhile, foreign investment (PMA) has a significant negative effect on the unemployment rate, indicating that increasing foreign investment is able to create new jobs that reduce the unemployment rate.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

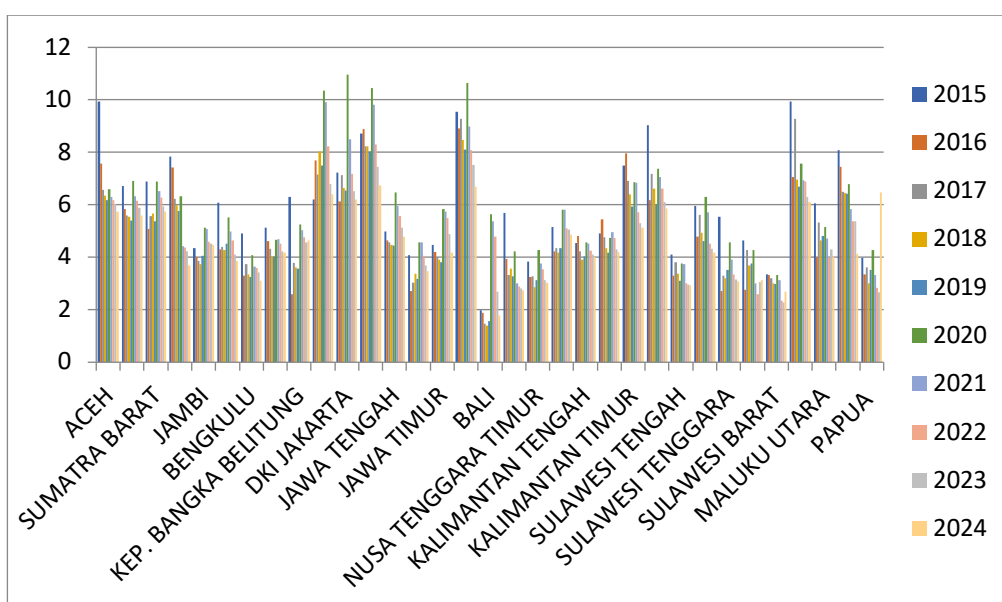


Corresponding Author:

Ade Sulistiana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
Bandar Lampung, Indonesia
Email: adesulistiana979@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan struktural yang terus dihadapi oleh Indonesia dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan stabilitas perekonomian nasional [1] Sebagai negara berkembang dan dengan jumlah penduduk produktif yang terus meningkat, tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai menjadi semakin kompleks [2] . Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada rendahnya produktivitas nasional, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta potensi masalah sosial di masyarakat [3]. Potensi social masyarakat sendiri biasanya berupa tindakan kejahatan, radikaslime atau bahkan tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran bukan sekadar permasalahan ekonomi semata, melainkan juga persoalan sosial yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, upaya menurunkan tingkat pengangguran tidak cukup hanya melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan ekonomi makro yang terintegrasi dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta lingkungan investasi yang kondusif. Dalam menghadapi tantangan tersebut, faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penanaman modal asing (PMA) menjadi perhatian utama dalam berbagai studi ekonomi dan kebijakan publik. Inflasi, sebagai cerminan stabilitas harga, sering kali memengaruhi kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terhadap berkurangnya aktivitas ekonomi dan peningkatan pengangguran [4]. Namun, dalam kondisi tertentu, inflasi yang moderat dapat mendorong kegiatan produksi dan investasi.



Gambar 1. Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2015- 2023

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada rendahnya produktivitas nasional, tetapi juga dapat memicu kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga potensi gejolak sosial di masyarakat. Fenomena pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif, yang mencerminkan ketidakstabilan kondisi ekonomi global dan domestic. Pada periode 2015 hingga 2019, tingkat pengangguran di Indonesia relatif stabil, meskipun terdapat perbedaan antara provinsi satu dengan lainnya. Namun, perubahan signifikan terjadi pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda. Dampak pandemi sangat besar terhadap sektor industri, jasa, dan pariwisata, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, dan angka pengangguran melonjak drastis di hampir seluruh wilayah Indonesia [5]. Provinsi dengan konsentrasi ekonomi tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengalami lonjakan tajam, sementara Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata juga mengalami dampak luar biasa.

Peningkatan pengangguran yang signifikan di provinsi seperti Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau menegaskan pentingnya diversifikasi struktur ekonomi daerah agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan yang terlalu besar pada sektor tertentu menjadikan daerah sangat rentan saat sektor tersebut terganggu, seperti yang terlihat pada pariwisata selama pandemi. Meskipun demikian, sejak tahun 2021 hingga 2024, tren pengangguran nasional mulai menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi ekonomi dan pelonggaran pembatasan sosial. Proses vaksinasi massal, pemulihan sektor usaha, serta kebijakan fiskal dan moneter yang responsif mendorong terciptanya kembali lapangan kerja. Beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan mencatat perbaikan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Menurut [6] perbedaan pola pengangguran antar wilayah ini juga sangat mencolok. Provinsi di Pulau Jawa sendiri cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibanding Provinsi di luar Jawa. Hal ini bisa dijelaskan melalui dua faktor utama factor pertama yaitu karena adanya kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan persaingan kerja semakin ketat, selanjutnya untuk factor yang kedua yaitu karena urbanisasi yang pesat tidak selalu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang seimbang [7]. Di sisi lain, provinsi-provinsi seperti Papua, Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dan stabil. Meskipun sektor formal belum berkembang secara pesat di daerah-daerah ini, masyarakat cenderung bekerja di sektor informal atau pertanian subsisten yang secara statistik mengurangi angka pengangguran terbuka. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah juga mulai memperkenalkan program seperti Kartu Prakerja, yang bertujuan meningkatkan keterampilan kerja melalui pelatihan berbasis teknologi [8]. Pemulihan ini didukung oleh percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang fokus pada penciptaan lapangan kerja baru. Akan tetapi tantangan akan tetap ada, seperti peningkatan jumlah pengangguran muda dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja yang belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah juga tentunya mendorong pengembangan sumber daya manusia dan investasi di sektor teknologi serta energi terbarukan. Hal ini tentunya bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara mendasar, masalah pengangguran belum dapat diatasi secara tuntas, dan masih rentan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi.

Tingkat pengangguran di Indonesia, dari tahun 2015 hingga 2024, tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika lokal tiap provinsi, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi makro yang saling berkaitan. Seperti Inflasi, sebagai indikator kestabilan harga barang dan jasa, memainkan peran penting dalam menentukan daya beli masyarakat dan stabilitas usaha. Saat inflasi tinggi, justru daya beli masyarakat akan menurun, dan pelaku usaha cenderung mengurangi produksi dan memotong biaya, termasuk mengurangi tenaga kerja, yang akhirnya menaikkan angka pengangguran [9]. Sebaliknya, ketika inflasi terkendali menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Misalnya, yaitu pada tahun-tahun setelah pandemi, saat inflasi berhasil ditekan,

beberapa sektor mulai pulih, yang terlihat dalam menurunnya angka pengangguran di banyak provinsi.

Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional juga merupakan hal yang menjadi penentu utama dinamika pengangguran. Sebelum pandemi, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, yang mana berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, pada tahun 2020 saat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tajam akibat pandemi COVID-19, pengangguran melonjak drastis di hampir semua provinsi. Daerah-daerah dengan sektor jasa yang dominan seperti DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau mengalami pukulan paling berat karena pembatasan sosial dan penurunan konsumsi masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2021, dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali positif, terlihat adanya tren penurunan pengangguran yang cukup signifikan di banyak daerah, hal ini menandakan bahwa percepatan ekonomi pascapandemi mampu membuka kembali lapangan pekerjaan [10].

Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) di masing-masing provinsi juga sangat memengaruhi tingkat pengangguran. Dimana Provinsi dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki pengangguran yang lebih rendah atau lebih cepat pulih dari krisis [11]. Sebaliknya, juga di daerah dengan SDM yang masih rendah, pekerja lebih rentan terhadap kehilangan pekerjaan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja juga menjadi kunci untuk menurunkan pengangguran jangka panjang. Sebagai contoh, provinsi seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan yang mulai meningkatkan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja mengalami penurunan pengangguran yang lebih stabil dibandingkan provinsi lain yang belum fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja.

Penanaman modal asing (PMA) juga memainkan peran yang penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Provinsi-provinsi yang berhasil menarik investor asing umumnya mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dan dapat meningkatkan pembukaan pabrik, industri, maupun jasa baru yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat adalah contoh daerah yang menjadi salah satu tujuan investasi asing, baik di sector pertambangan maupun manufaktur. Akan tetapi, keterbatasan infrastruktur, regulasi yang tidak ramah investor, serta kualitas tenaga kerja yang belum memadai bisa menjadi hambatan dalam menarik PMA secara merata di seluruh provinsi [12]. Oleh karena itu, sinkronisasi antara peningkatan kualitas SDM dan kebijakan ramah investasi menjadi sangat penting untuk memperkuat penurunan pengangguran (Choirunnisa & Khoirudin 2024). Dengan mempertimbangkan keseluruhan faktor makroekonomi, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran di Indonesia bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan hasil adanya interaksi kompleks dari berbagai variabel ekonomi dan sosial. Grafik pengangguran dari 2015 hingga 2024 juga mencerminkan kondisi dinamis tersebut, mulai dari stabilitas prapandemi, lonjakan akibat krisis, hingga pemulihan yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM, dan masuknya investasi. Keberhasilan suatu provinsi dalam menurunkan angka pengangguran juga sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola kombinasi faktor-faktor tersebut secara holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu berdasarkan yang dilakukan strategi penanggulangan pengangguran ke depan tidak cukup hanya dengan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga harus mencakup reformasi pendidikan, pelatihan vokasional, insentif investasi, dan penguatan daya saing daerah secara menyeluruh.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup periode tahun 2015 hingga 2023. Data dikumpulkan dari 33 provinsi di Indonesia dan diperoleh dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan data panel memungkinkan analisis yang menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan perbandingan antarwilayah (*cross-section*), sehingga mampu menangkap dinamika tingkat pengangguran. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel independennya yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan penanaman modal asing.

Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan model utama yang dapat digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Sebelum melangkah ke tahap analisis inti, terlebih melakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas secara statistik. Pengujian tersebut mencakup uji normalitas yang mana digunakan untuk melihat distribusi data, uji multikolinearitas untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel independen, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians error, serta uji autokorelasi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar error dalam observasi yang berbeda waktu. Sementara itu, uji F digunakan untuk menilai pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Setelah model dinyatakan memenuhi semua asumsi klasik, maka selanjutnya yaitu melakukan seleksi model terbaik.

Pemilihan model dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap pengujian, yakni Uji Chow untuk menentukan apakah model CEM atau FEM yang lebih sesuai, serta Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara model FEM dan REM. Apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan pilihan model yang saling bertentangan, maka Uji Lagrange Multiplier digunakan sebagai pengujian tambahan untuk memutuskan pemilihan model terbaik antara CEM dan REM. Setelah model terbaik diperoleh, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel. Kemudian Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan melihat signifikansi dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Sedangkan uji F dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model, sehingga memberikan gambaran mengenai kekuatan model secara keseluruhan.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$UNEMP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 UNEMP_{i,t-1} + \beta_2 INFL_{i,t} + \beta_3 GROWTH_{i,t} + \beta_4 KSDM_{i,t} + \beta_5 PMA_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

$UNEMP_{i,t}$ = Tingkat pengangguran

$UNEMP_{i,t-1}$ = Tingkat pengangguran pada tahun sebelumnya

$INFL$ = variabel inflasi

$GROWTH$ = variabel pertumbuhan ekonomi

$KSDM$ = variable kualitas sumber daya manusia

PMA = variabel penanaman modal asing di Indonesia,

β_0 = Konstanta (intercept)

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi variabel independen

$e = \text{error term I}$ = 1,2, ... n, menunjukkan provinsi-provinsi di Indonesia
(Cross section)

t = 1,2, ... t, menjelaskan periode tahun yang diteliti
(Time series)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variable	Mean	Std. Dev	Min	Max	Obs	Skew	Kurt
Unemp	5.239697	1.820895	1.4	10.95	N= 297	0.698632	0.28595
Infl	4.148685	2.840053	.18	14.25	N= 297	1.2743379	1.156050
Growth	4.534983	3.770268	-15.74	22.94	N= 297	0.4307	6.4234
Ksdm	8.929798	.8919656	6.27	11.42	N= 297	0.00069	0.20123
Pma	7.147138	17.78916	.07	174.19	N= 297	-0.59193	1.27686

Uji normalitas dilakukan menggunakan pendekatan skewness dan kurtosis, dengan ketentuan bahwa data dianggap berdistribusi normal apabila nilai skewness berada dalam kisaran -2 sampai +2, distribusi data juga dikatakan normal apabila nilai kurtosisnya berada dalam rentang yang sama, yaitu antara -7 hingga +7 [6]. Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel inflasi, growth, ksdm dan pma memenuhi kriteria asumsi normalitas.

3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
Inflasi	2.09	0,966651
PE	1.04	0.962916
KSDM	1.02	0.216287
PMA	1.59	0.324519

Sebuah model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas apabila nilai VIF > 10. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 variabel memiliki nilai VIF jauh dibawah ambang batas 5 ataupun 10, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas diantara variabel- variabel dalam model. Hal ini berarti, variabel-variabel independen tidak memiliki hubungan linear yang tinggi antara satu dengan yang lainnya dan dapat digunakan tanpa melihat bahwa hasil pengestimasi mengalami kebiasaan akibat multikolinearitas.

3.3 Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi

Adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam sebuah model regresi memang tidak akan menyebabkan bias pada estimator parameternya, yang tetap konsisten. Namun, masalah utamanya adalah estimator tersebut kehilangan efisiensinya atau tidak lagi memiliki ragam terbaik. Menurut Wooldridge (2013), meskipun estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam kondisi ini tetap tidak bias dan konsisten, *standard error* yang dihasilkan menjadi bias. Bias pada *standard error* ini, yang bisa berupa estimasi yang terlalu rendah (*underestimasi*) atau terlalu tinggi (*overestimasi*), dapat mengganggu validitas uji statistik seperti Uji T dan Uji F, sehingga berisiko membawa pada penarikan kesimpulan yang keliru.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, pendekatan *robust standard error* digunakan sebagai alternatif dari *standard error* konvensional. Penggunaan *robust standard error* mampu mengoreksi efek heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta meningkatkan akurasi dan validitas hasil estimasi. Dalam konteks analisis data panel, metode ini juga mudah diimplementasikan, misalnya dengan menambahkan perintah *robust* saat menggunakan perangkat lunak Stata.

3.4 Pemilihan Model Terbaik

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model

	Prob.	Kesimpulan
Uji Chow	0,0000	FEM
Uji Hausman	0,0459	FEM

Hasil pengujian model menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) dari Uji Chow sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, hasil Uji Hausman menghasilkan *p-value* sebesar 0,0459 yang juga berada di bawah ambang signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM), karena mampu menangkap perbedaan karakteristik individu antar provinsi secara lebih akurat.

3.5 Hasil Regresi Data Panel

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob
Inflasi	-0108713	0316876	-0.34	0.732
Pe	-0953636	0150324	-6.34	0.000
Ksdm	-1.621941	1.357425	-1.19	0.233
Pma	8.881146	11.5366	0.77	0.442
	Prob>F	0.0000		
	R-Square	0.1577		

3.5.1 Uji t-statistik

Berdasarkan hasil uji t-statistik pada regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM), diperoleh bahwa variabel inflasi memiliki koefisien sebesar 0.0385 dengan nilai *p-value* 0.662, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tidak signifikan secara statistik, meskipun arah hubungannya positif. Artinya, peningkatan inflasi cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran, namun hubungan ini tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien sebesar -0.9536 dengan *p-value* 0.000, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% dalam pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0.95%, mendukung teori Okun yang menyatakan adanya hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM) memiliki koefisien sebesar 1.3361 dengan *p-value* 0.020, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, menandakan bahwa peningkatan indikator kualitas SDM justru disertai peningkatan pengangguran akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Adapun penanaman modal asing (PMA) menunjukkan koefisien sebesar -0.0219 dengan *p-value* 0.000, menandakan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, yang berarti bahwa peningkatan investasi asing mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran secara nyata di Indonesia selama periode 2015–2023

3.5.2 Uji F-statistik

Berdasarkan hasil uji F-statistik pada output regresi, nilai Prob > F sebesar 0.0000, yang berarti jauh lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran

di Indonesia. Dengan demikian, model regresi ini layak untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh gabungan variabel-variabel tersebut terhadap pengangguran.

3.6 Pembahasan Hasil Penelitian

3.6.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil regresi data panel, variabel inflasi memiliki nilai koefisien positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Artinya, secara statistik, perubahan inflasi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan tingkat pengangguran selama periode penelitian. Koefisien positif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa saat inflasi meningkat, tingkat pengangguran juga cenderung naik, namun hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan yang pasti. Hasil ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktur pasar tenaga kerja yang fleksibel, atau kebijakan moneter yang mampu menstabilkan dampak inflasi terhadap sektor ketenagakerjaan [15]. Selain itu, ketidaksignifikanan ini juga dapat mencerminkan bahwa faktor-faktor lain di luar inflasi lebih dominan dalam memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia.

3.6.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan positif dalam output barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu. Dalam konteks Indonesia tahun 2015–2023, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun secara nyata. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi klasik, khususnya hukum Okun, yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja. Dalam praktiknya, ketika ekonomi tumbuh, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat [16]. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja, sehingga menyerap angkatan kerja yang menganggur. Hasil koefisien regresi negatif sebesar -0.9536 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar kurang lebih 0.95%. Ini mencerminkan efisiensi pasar tenaga kerja dan peran sektor produktif dalam mendistribusikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas ke masyarakat..

3.6.3 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (KSDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2015–2023. Artinya, peningkatan kualitas SDM justru diikuti oleh meningkatnya tingkat pengangguran. Meskipun bertentangan dengan hipotesis awal, fenomena ini dapat dijelaskan oleh adanya mismatch antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, lulusan dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki ekspektasi kerja yang tinggi, sehingga lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Ketimpangan penyebaran industri dan kesempatan kerja di berbagai daerah juga menyebabkan banyak SDM berkualitas tidak terserap. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai agar dapat menurunkan tingkat pengangguran secara efektif.

3.6.4 Pengaruh Investasi Asing Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil analisis menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2015–2023. Artinya, semakin tinggi nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa investasi asing mampu menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung melalui pembukaan usaha maupun secara tidak langsung

melalui efek berantai terhadap sektor-sektor lain. Masuknya PMA biasanya membawa pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi, dan ekspansi sektor industri, yang semuanya memerlukan tenaga kerja. Dalam banyak kasus, perusahaan asing juga memperkenalkan teknologi, sistem kerja, dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal, yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing pekerja. Selain itu, PMA juga masuk ke sektor padat karya seperti manufaktur dan jasa turut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini sangat membantu dalam menekan angka pengangguran, terutama di wilayah yang sebelumnya belum tersentuh investasi besar. Namun, efektivitas PMA dalam mengurangi pengangguran sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam memastikan investasi tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data panel 33 provinsi di Indonesia selama periode 2015–2023, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia (KSDM), dan penanaman modal asing (PMA) secara signifikan memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2015–2023. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, yang berarti peningkatan keduanya cenderung menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini mencerminkan bahwa kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, kualitas sumber daya manusia menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan pendidikan atau keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menjadi catatan penting bahwa peningkatan kualitas SDM perlu diiringi dengan penyesuaian terhadap permintaan dunia kerja. Sementara itu, penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, artinya masuknya investasi asing mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong penurunan pengangguran secara nyata. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara stabilitas makroekonomi, kualitas tenaga kerja, dan investasi asing dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang terintegrasi, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga memastikan kesiapan tenaga kerja agar dapat terserap dengan optimal di pasar kerja.

REFERENSI

- [1] Jumhur. Penerapan Autoregressive Distributed Lag Dalam Memodelkan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan FDI Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *J Ekon Bisnis dan Kewirausahaan*. 2020;9 ,No 3(Kemampuan Model ARDL dalam memprediksi hubungan antara variabel ekonomi dan menganalisis variabel ekonomi makro lainnya).
- [2] Mufida LLA, Nasir MS. Analisis Dinamis Tingkat Pengangguran di Indonesia. *J Macroecon Soc*. 2023;1(1):1–14.
- [3] Lubis TM. Inflasi Dan Pengangguran Dalam Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sos dan Pendidikan)*. 2023;7(1):1–5.
- [4] Hafidz Meiditambua Saefulloh M, Rizah Fahlevi M, Alfa Centauri S. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *J Keuangan Negara dan Kebijak Publik*. 2023;3(1):17–26.
- [5] Aziz AA, Julia A, Haviz M. Pengaruh Jumlah Industri , Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Kab / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. 2020;400–10.
- [6] Soekapdjo S, Oktavia MR. Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *J Ecodemica J Ekon Manaj dan Bisnis*. 2021;5(2):94–102.

- [7] Rasyida NU. Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia periode 1990-2019 (Aplikasi Hukum Okun). *J Ilm Mhs FEB*. 2021;9(2):2–13.
- [8] Krisnandika VR, Aulia D, Jannah L. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sos dan Pendidikan)*. 2021;5(3):720–9. \
- [9] Djuli Sjafei Purba, Vitryani Tarigan. Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19. *J Ekuilnomi*. 2021;3(1).
- [10] Ambya A, Ciptawaty U. Hubungan antara belanja pemerintah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru di Provinsi Lampung. *J Paradig Ekon*. 2022;17(1):157–66.
- [11] Lestari DA, Muhar AM, Hafas HR. Dampak Quality Of Human Resources Terhadap Kinerja Karyawan Stres Kerja Sebagai Mediasi. *IDEI J Ekon Bisnis*. 2024;5(1):32–40.
- [12] Manajemen I, Dalam S, Kualitas M, Di P, Publik... S, Sri SP, et al. Economics and Digital Business Review Abstrak. 2022;5(2):745–56.
- [13] Choirunnisa AM, Khoirudin R. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, TPAK Terhadap Penanaman Modal Asing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Socius J Penelit Ilmu-Ilmu Sos [Internet]*. 2024;1(12):327–34. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12750605>
- [14] George D, Mallery P. *IBM SPSS Statistics 23 Step by Step*. IBM SPSS Statistics 23 Step by Step. 2016.
- [15] Emalia Z, Murwiati A, Awaluddin I, Tri Purwaningsih V. Pengembangan Smart Tourism Ekosistem Mangrove Petengoran Untuk Memperkuat Kemandirian Masyarakat Desa Gebang Kabupaten Pesawaran. *BEGAWI J Pengabd Kpd Masy*. 2024;2(1):6–12.
- [16] Wahyudi H, Nairobi, Suparta I wayan, Palupi WA. Penyuluhan Ekonomi Koperasi Bagi Generasi Milenial. *BEGAWI J Pengabd Kpd Masy*. 2023;1(2):83–90.